

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, SISTEM  
PENGENDALIAN INTERNAL, DAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN  
BERBASIS AKRUAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAHAN**

**(Studi Pada SKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020)**

***THE EFFECT OF HUMAN RESOURCES COMPETENCY, INTERNAL CONTROL  
SYSTEM, AND GOVERNMENT ACCRUAL-BASED ACCOUNTING STANDARDS ON  
THE QUALITY OF GOVERNMENT FINANCIAL STATEMENTS  
( Study On The Regional Work Unit West Bandung Regency in 2020)***

Aghnia Nurfaeza<sup>1</sup>, Sri Rahayu<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Telkom, Bandung

aghinfa@student.telkomuniversity.ac.id<sup>1</sup>, sriahayu@telkomuniversity.ac.id<sup>2</sup>

---

**Abstrak**

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah atas penggunaan daerah dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah dan penyelenggaraan operasional pemerintahan. Studi ini bertujuan untuk menginvestigasi apakah kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, dan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Penelitian ini menggunakan sampel yaitu kepala SKPD dan Kepala Sub Bagian pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bandung Barat tahun 2020. Teknik penentuan sampel yaitu menggunakan metode sampling jenuh/sensus, yaitu semua populasi dijadikan sampel sebanyak 84 orang. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian deskriptif verifikatif. Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan *software* SPSS versi 25. Penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, dan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual berpengaruh positif signifikan secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kompetensi sumber daya manusia secara parsial berpengaruh positif signifikan, sedangkan sistem pengendalian internal dan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan variabel lain yang dianggap dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, serta diharapkan dapat memperluas objek penelitian, seperti pada SKPD di Kota Bandung maupun Kabupaten Bandung.

**Kata Kunci :** Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual, Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

---

**Abstract**

*Local Government Finance report (LKPD) is one manifestation of government accountability over the use of regions in the framework of the implementation of regional autonomy and the implementation of operational governance. This study aims to investigate whether the competence of the human resources, internal control system, and standards of government accounting accrual-based effect on quality of financial statements. This study used a sample of the head of SKPD and the Head of Sub-department of Finance on the Work Unit (SKPD) West Bandung Regency in 2020. Sampling technique is using the method of saturated sampling/census. All of the population sampled as many as 80 people. This research is included in descriptive research verification. Model of data analysis used in this research is multiple linear regression analysis using software SPSS version 25. This study shows that the competence of human resources, the internal control system, and the government accounting standards accrual-based significant positive effect simultaneously on the quality of local government financial reports. Human resource competence partially significant positive effect, while the internal control system and the government accounting standards accrual-based does not affect the quality of local government financial reports. For the next researcher is expected to use other variables that are considered to affect the quality of local government financial report, and is expected to expand the object of research, such as on the SKPD in the City of Bandung and Bandung Regency.*

**Keywords:** *The Competence Of Human Resources, The System Of Internal Controls, Government Accounting Standards Accrual-Based, Quality Of Local Government Financial Reports.*

## 1. Pendahuluan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus memenuhi karakteristik-karakteristik kualitatif, yakni relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas LKPD yang memuat informasi yang berguna bagi semua pihak, dan LKPD yang berkualitas mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik pemerintah daerah.

Laporan keuangan mempunyai tujuan yaitu menyediakan informasi tentang posisi keuangan, realisasi anggaran, dan arus kas dan kinerja keuangan yang bermanfaat bagi para pengguna laporan pada pemerintah daerah. Namun fenomena yang terjadi pada pemerintah Kabupaten Bandung Barat yaitu BPK memberikan opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bandung Barat yaitu Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun 2015-2018. Selain itu, menurut Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna mengatakan bahwa Kabupaten Bandung Barat gagal meraih predikat WTP karena kasus yang melibatkan RSUD Lembang terkait dengan penggelapan dana BPJS oleh direktur dan bendahara yang menyebabkan kerugian dana daerah sebesar Rp 7,7 Miliar.<sup>[7]</sup> Kemudian, kualitas laporan keuangan daerah tidak bisa terlepas dari kompetensi sumber daya manusia yang ada. Sumber daya manusia harus memiliki kualitas nilai informasi yang baik dan staf pengelola keuangan menjadi salah satu faktor utama dalam menyusun laporan keuangan. Sehingga dapat dipakai oleh pengguna.<sup>[5]</sup> Informasi laporan keuangan, selain itu, sistem pengendalian internal dan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual juga berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan dan laporan tersebut apakah dapat dipertanggungjawabkan atau tidak.

## 2. Dasar Teori dan Metodologi

### 2.1 Dasar Teori

#### 2.1.1 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan merupakan laporan mengenai suatu posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan keuangan tersebut secara terstruktur. Bagi pemerintah daerah menjadi suatu keharusan untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah mencerminkan tertib pengelolaan keuangan pemerintah daerah, yang mencakup tertib administrasi dan taat asas. Indikator bahwa laporan keuangan pemerintah daerah sudah berkualitas yaitu telah memenuhi karakteristik seperti relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

#### 2.1.2 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan manusia yang bekerja dalam lingkungan suatu organisasi dan berfungsi sebagai modal di dalam organisasi yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata secara fisik dan non fisik dalam organisasi.<sup>[8]</sup> Indikator dalam kompetensi sumber daya manusia terdiri dari: (1) Pengetahuan (*Knowledge*), dan (2) Keterampilan (*Skill*).

Semakin tinggi kompetensi sumber daya manusia, maka semakin baik pula laporan keuangan yang dihasilkan. Pada proses penyusunan laporan keuangan pemerintah, SKPD harus mempunyai SDM yang kompeten, kemudian mempunyai pengetahuan tentang cara dan proses penyusunan laporan keuangan, didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pelatihan/workshop, serta mempunyai pengalaman pada bidang keuangan. Hal ini sejalan dengan peneliti<sup>[3]</sup> bahwa kompetensi SDM berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan teori dan pernyataan yang diperoleh dari penelitian sebelumnya, hipotesis yang diajukan yaitu:

**H1: Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan.**

#### 2.1.3 Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) ialah sistem pengendalian internal yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dengan tujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.<sup>[6]</sup> Indikator dalam sistem pengendalian internal terdiri dari: (1) Lingkungan Pengendalian, (2) Penilaian Risiko, (3) Kegiatan Pengendalian, (4) Informasi dan Komunikasi, dan (5) Pemantauan.

Dengan adanya pengendalian internal, suatu organisasi dapat mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, kemudian dengan sistem yang baik, risiko terjadinya kesalahan dan kekeliruan pencatatan atau perhitungan dapat dihindari sehingga mengurangi kemungkinan pemerintah daerah mengalami kekeliruan.<sup>[1]</sup> Semakin tinggi sistem pengendalian internal tersebut, maka semakin baik pula laporan keuangan yang dihasilkan. Hal ini sejalan dengan penelitian<sup>[3]</sup> bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan.

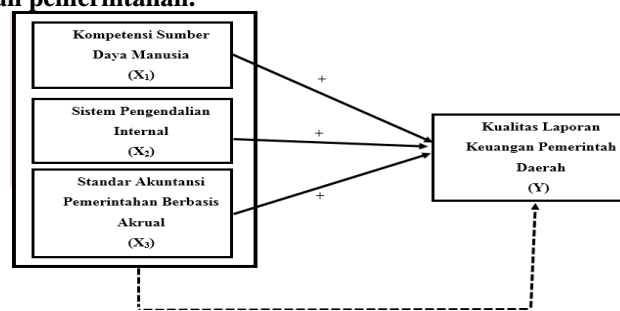
## H2: Sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan

### 2.1.4 Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrua adalah standar yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrua, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Indikator dalam SAP berbasis akrua terdiri dari: (1) Pemahaman atas peraturan, prosedur, dan kebijakan tentang peraturan daerah, (2) Pemahaman tentang penyajian dalam laporan keuangan berbasis akrua, dan (3) Pemahaman komponen laporan keuangan berbasis akrua.

Dengan adanya pemahaman standar akuntansi pemerintahan berbasis akrua dan dijadikan pedoman bagi pemakainya, maka kualitas laporan yang dihasilkan akan semakin baik. Hal ini sejalan dengan penelitian<sup>[1]</sup> bahwa standar akuntansi pemerintahan berbasis akrua berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan.

### H3: Standar akuntansi pemerintah berbasis akrua berpengaruh positif signifikan secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan.



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

Sumber: Data yang telah diolah (2021)

Keterangan:

-----> : Pengaruh secara simultan

————> : Pengaruh secara parsial

## 2.2 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kepala SKPD dan Kepala Sub Bagian Keuangan selaku pengelola keuangan pada 42 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Bandung Barat yang berjumlah 84 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan *non probability sampling* dengan sampel jenuh. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah Kepala SKPD dan Kepala Sub Bagian Keuangan pada instansi di SKPD Kabupaten Bandung Barat yang terdiri dari badan, dinas, inspektorat, asisten, dan bagian. Berdasarkan observasi yang dilaksanakan oleh peneliti seluruh Kepala SKPD dan Kepala Sub Bagian Keuangan pada instansi berjumlah 84 responden. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji validitas, uji reabilitas, analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik yang terdiri dari (1) uji normalitas, (2) uji multikolinieritas, dan (3) uji heteroskedastisitas. Kemudian dilakukan analisis linier berganda dan selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis yang terdiri dari (1) koefisien determinasi berganda ( $R^2$ ), (2) Pengujian Simultan (Uji F), dan (3) Pengujian Parsial (Uji t).

## 3. Pembahasan

### 3.1 Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif dilakukan untuk mengetahui tanggapan terhadap pernyataan-pernyataan yang terdapat pada kuesioner yang diberikan kepada responden. Deskriptif variabel pada penelitian ini terdiri dari empat variabel, yaitu Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1), Sistem Pengendalian Internal (X2), Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua (X3), dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) pada SKPD Kabupaten Bandung Barat. Berikut merupakan gambaran pada masing-masing variabel tersebut.

**Tabel 3.1**  
**Hasil Uji Statistik Deskriptif**

Variabel	Nilai Indeks Maksimum	Total Skor	Persentase	Kategori
Kompetensi SDM	1350	1032	76,4%	Baik
Sistem Pengendalian Internal	1575	1280	81,2%	Baik

SAP Berbasis Akruaal	1575	1191	75,6%	Baik
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah	2250	1790	79.5%	Baik

Sumber: Data primer yang telah diolah IBM SPSS 25 (2020)

Tabel 3.1 hasil dari uji statistik deskriptif menunjukkan bahwa butir-butir pertanyaan dalam kuesioner pada variabel Kompetensi SDM (X1), Sistem Pengendalian Internal (X2), SAP Berbasis Akruaal (X3), dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah berada pada kategori baik dikarenakan persentase yang ditunjukkan berada pada interval > 68%-84%.

**3.2 Uji Asumsi Klasik**

**A. Uji Normalitas**

**Tabel 3.2**  
**Hasil Uji Normalitas**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		45
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,90264063
Most Extreme Differences	Absolute	,074
	Positive	,074
	Negative	-,058
Test Statistic		,074
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>c,d</sup>

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data primer yang telah diolah IBM SPSS 25 (2020)

Berdasarkan tabel 3.2 hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* dapat diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,200. Karena nilai Sig. 0,200 > 0,05 maka data tersebut dapat digunakan karena variabel residual berdistribusi normal.

**B. Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas mempunyai tujuan untuk menjauhi kebiasaan dalam proses pengambilan keputusan pada uji masing-masing independen terhadap variabel dependen. Dengan menggunakan SPSS versi 25.0 diperoleh nilai tolerance dan VIF sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

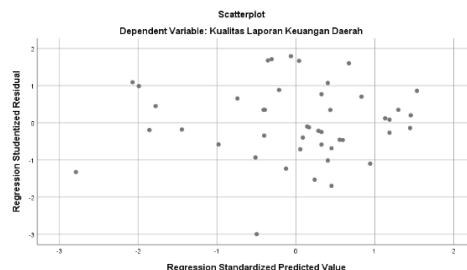
Model	Coefficients <sup>a</sup>	Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	SDM	,653	1,531
	SPI	,821	1,219
	SAP	,778	1,285

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sumber: Data primer yang telah diolah IBM SPSS 25 (2020)

Berdasarkan tabel 3.3 hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa tidak terdapat multikolonieritas karena nilai tolerance yang sudah lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF yang kurang dari 10. Dengan demikian tidak terdapat hubungan yang kuat atau tidak berkaitan antara variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1), Sistem Pengendalian Internal (X2), SAP Berbasis Akruaal (X3), dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y).

**C. Uji Heteroskedastisitas**



**Gambar 3.1**  
**Hasil Uji Heterokedastisitas**

Sumber: Data primer yang telah diolah IBM SPSS 25 (2020)

Berdasarkan tabel 3.4 hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa dalam model tidak terdapat heterokedastisitas karena pada gambar tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini menandakan bahwa dalam model, variansi dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain sama atau konstan.

### 3.3 Analisis Linear Berganda

**Tabel 3.4**  
**Hasil Analisis Linear Berganda**

Coefficients <sup>a</sup>			
Unstandardized Coefficients			
Model		B	Std. Error
1	(Constant)	12,174	5,711
	SDM	,640	,224
	SPI	,338	,192
	SAP Akruaal	,132	,125

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Sumber: Data primer yang telah diolah IBM SPSS 25 (2020)

Berdasarkan output pada tabel 3.4 didapat nilai konstanta sebesar 12,174 dan koefisien regresi Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1) sebesar 0,640, koefisien regresi Sistem Pengendalian Internal (X2) sebesar 0,338, dan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akruaal (X3) sebesar 0,132. sehingga dapat dibentuk persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 12,174 + 0,640 X_1 + 0,338 X_2 + 0,132 X_3$$

Berdasarkan persamaan di atas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a = 12,174 artinya jika variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y) dipengaruhi oleh ketiga variabel bebasnya yaitu Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1), Sistem Pengendalian Internal (X2), Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akruaal (X3), maka variable Kualitas Laporan Keuangan (Y) akan meningkat.
- b1 = 0,640 artinya jika Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1) meningkat, maka variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y) juga akan meningkat.
- b2 = 0,338 artinya jika Sistem Pengendalian Internal (X2) meningkat, maka variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y) juga akan meningkat.
- b3 = 0,132 artinya jika Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akruaal (X3) meningkat, maka variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y) akan mengalami peningkatan.

### 3.4 Pengujian Hipotesis

#### A. Koefisien Determinan Berganda (R<sup>2</sup>)

**Tabel 3.5**  
**Hasil Uji Koefisien Determinan Berganda (R<sup>2</sup>)**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,634 <sup>a</sup>	,402	,358	3,007

a. Predictors: (Constant), SAP Akruaal, SPI, SDM

Sumber: Data primer yang telah diolah IBM SPSS 25 (2020)

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 3.5 diperoleh nilai *Adjusted R Square* = 0,358 atau 35,8%. Hal ini menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1), Sistem Pengendalian Internal (X2), dan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruaal (X3) memberikan pengaruh secara simultan sebesar 35,8% terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y). Sedangkan sisanya sebesar 64,2% (100%-35,8%) merupakan kontribusi

dari faktor lain selain variabel-variabel lain di luar penelitian ini.

## B. Uji Simultan (Uji F)

**Tabel 3.6**  
**Hasil Uji Simultan (Uji F)**

Model	ANOVA <sup>a</sup>					
		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	249,197	3	83,066	9,187	,000 <sup>b</sup>
	Residual	370,714	41	9,042		
	Total	619,911	44			

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Daerah

b. Predictors: (Constant), SAP AkruaI, SPI, SDM

Sumber: Data primer yang telah diolah IBM SPSS 25 (2020)

Berdasarkan output pada tabel 3.6 didapat nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 atau 0,000 < 0,05. Dikarenakan nilai signifikansi lebih kecil dari  $\alpha$  (0,05), maka H<sub>0</sub> ditolak yang artinya secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X<sub>1</sub>), Sistem Pengendalian Internal (X<sub>2</sub>), dan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI (X<sub>3</sub>) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y) pada Satuan Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat.

## C. Uji Parsial (Uji t)

**Tabel 3.7**  
**Hasil Uji Parsial (Uji t)**

Model		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients	Std. Error	Standardized Coefficients	t	Sig.
1	(Constant)	12,174	5,711		2,132	,039
	SDM	,640	,224	,426	2,852	,007
	SPI	,338	,192	,235	1,762	,085
	SAP AkruaI	,132	,125	,144	1,052	,299

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Sumber: Data primer yang telah diolah IBM SPSS 25 (2020)

Berdasarkan hasil perhitungan untuk hipotesis pertama yaitu variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X<sub>1</sub>) diperoleh bahwa tingkat signifikansi sebesar 0,007 lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$  atau 0,007 < 0,05. Sehingga, H<sub>0</sub> ditolak yang artinya secara parsial variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X<sub>1</sub>) berpengaruh signifikan dengan arah yang positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan hasil perhitungan, untuk hipotesis kedua yaitu Sistem Pengendalian Internal (X<sub>2</sub>), diperoleh bahwa tingkat signifikansi sebesar 0,085 lebih besar dari  $\alpha = 0,05$  atau 0,085 > 0,05. Sehingga, H<sub>0</sub> diterima yang artinya bahwa secara parsial variabel Sistem Pengendalian Internal (X<sub>2</sub>) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y) pada SKPD di Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan hasil perhitungan, untuk hipotesis ketiga yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI (X<sub>3</sub>), diperoleh bahwa tingkat signifikansi sebesar 0,299 lebih besar dari  $\alpha = 0,05$  atau 0,299 > 0,05. Sehingga, H<sub>0</sub> diterima yang artinya Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI (X<sub>3</sub>) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

## 3.5 Pembahasan Hasil Pengujian

### A. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, dan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan pada SKPD Kabupaten Bandung Barat

Berdasarkan output pada tabel 3.6 didapat nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 atau 0,000 < 0,05. Dikarenakan nilai signifikansi lebih kecil dari  $\alpha$  (0,05), maka H<sub>0</sub> ditolak yang artinya secara simultan terdapat pengaruh yang positif signifikan antara variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X<sub>1</sub>), Sistem Pengendalian Internal (X<sub>2</sub>), dan SAP Berbasis AkruaI (X<sub>3</sub>) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y) pada Satuan Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat. Kemudian, hasil pada tabel 3.5 menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R Square* = 0,358 atau 35,8%. Hal ini menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia (X<sub>1</sub>), Sistem Pengendalian Internal (X<sub>2</sub>), dan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI (X<sub>3</sub>) memberikan pengaruh secara simultan sebesar 35,8% terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y). Sedangkan sisanya sebesar 64,2% (100%-35,8%) merupakan kontribusi dari faktor lain selain variabel-variabel lain di luar penelitian ini.

### **B. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan pada SKPD Kabupaten Bandung Barat**

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial seperti yang ditunjukkan pada tabel 3.7 Uji t diperoleh bahwa tingkat signifikansi sebesar 0,007 lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$  atau  $0,007 < 0,05$ . Sehingga,  $H_0$  ditolak yang artinya bahwa secara parsial variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia ( $X_1$ ) berpengaruh signifikan dengan arah yang positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ( $Y$ ) pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Artinya semakin tinggi tingkat kompetensi sumber daya manusia, maka kualitas laporan keuangan Daerah akan semakin baik.

Pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah didukung dengan analisis deskriptif tanggapan responden yang mendapat skor rata-rata dengan kategori baik sebesar 76,4% yang artinya responden setuju bahwa kompetensi sumber daya manusia dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini berarti bahwa sumber daya manusia dengan indikator pengetahuan dan keterampilan pada SKPD Kabupaten Bandung Barat berada pada kategori baik. Hal ini didukung dengan karakteristik responden yang mayoritas menempuh pendidikan sarjana dengan jurusan ekonomi dan telah bekerja selama lebih dari 10 tahun. Dengan kompetensi sumber daya yang baik, maka dapat membantu terwujudnya kualitas laporan keuangan yang baik pula, hal ini dibuktikan dengan tingginya tanggapan dari indikator pengetahuan pada item pertanyaan pertama sebesar 79,5% yaitu pegawai pada SKPD Kabupaten Bandung Barat telah memiliki pengetahuan mengenai teori keuangan dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian, kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu<sup>[3]</sup> yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan.

### **C. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan pada SKPD Kabupaten Bandung Barat**

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 3.7, untuk hipotesis kedua yaitu variabel Sistem Pengendalian Internal ( $X_2$ ) diperoleh bahwa tingkat signifikansi sebesar 0,085 lebih besar dari  $\alpha = 0,05$  atau  $0,085 > 0,05$ . Sehingga,  $H_0$  diterima yang artinya bahwa secara parsial variabel Sistem Pengendalian Internal ( $X_2$ ) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan ( $Y$ ) pada SKPD di Kabupaten Bandung Barat. Artinya jika sistem pengendalian internal pemerintah semakin baik, belum tentu penerapan terhadap kualitas keuangan Pemerintah Daerah akan baik pada SKPD Kabupaten Bandung Barat.

Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan daerah didukung dengan analisis deskriptif tanggapan responden yang mendapat skor rata-rata dengan kategori baik sebesar 81,2% yang artinya meskipun sistem pengendalian internal mendapat hasil yang baik pada SKPD Kabupaten Bandung Barat, namun jika dikaitkan dengan kualitas laporan keuangan pemerintah Daerah tidak memiliki pengaruh. Penerapan sistem pengendalian internal yang optimal akan berdampak pada kualitas laporan keuangan pemerintahan. Namun, ternyata dari hasil jawaban responden tidak sepenuhnya sistem pengendalian internal yang digunakan telah berjalan dengan baik. Hal itu dikarenakan kurang diterapkannya standar etika bagi pegawai. Selain itu, pegawai tidak selalu mengambil tindakan yang tegas atas pelanggaran kebijakan prosedur dan perilaku yang diterapkan pada SKPD Kabupaten Bandung Barat. Tentunya hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas keuangan yang dihasilkan. Hasil ini sejalan dengan penelitian<sup>[4]</sup> menemukan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

### **D. Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan pada SKPD Kabupaten Bandung Barat**

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 3.7, untuk hipotesis ketiga yaitu variabel Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI ( $X_3$ ) diperoleh bahwa tingkat signifikansi sebesar 0,299 lebih besar dari  $\alpha = 0,05$  atau  $0,299 > 0,05$ . Sehingga,  $H_0$  diterima yang artinya bahwa secara parsial variabel SAP Berbasis AkruaI ( $X_3$ ) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan ( $Y$ ) pada SKPD di Kabupaten Bandung Barat. Artinya bahwa SKPD Kabupaten Bandung Barat harus meningkatkan kinerja setiap pegawai dan melakukan pelatihan agar pegawai dapat mengerti standar akuntansi pemerintah berbasis akruaI.

Pengaruh standar akuntansi pemerintahan berbasis akruaI terhadap kualitas laporan keuangan dapat dilihat dari hasil tanggapan responden yaitu sebesar 75,6%. Hal ini memiliki arti bahwa meskipun standar akuntansi pemerintah berbasis akruaI mendapat hasil yang baik pada SKPD Kabupaten Bandung Barat, namun jika dikaitkan dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tidak memiliki pengaruh. Penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akruaI yang optimal akan berdampak pada kualitas laporan keuangan pemerintahan. Namun, ternyata dari hasil jawaban responden tidak sepenuhnya standar akuntansi pemerintahan berbasis akruaI yang digunakan sudah berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan masih kurangnya pemahaman tentang penggunaan basis akruaI untuk mengakui aset, kurangnya pengetahuan tentang penyajian informasi tentang penjelasan pos-pos dalam laporan keuangan serta kurangnya pemahaman kebijakan dari SAP 2010. Hal ini sejalan dengan penelitian<sup>[2]</sup>

menemukan bahwa standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

#### 4. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai pengaruh dari sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, dan standar akuntansi keuangan berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah pada SKPD Kabupaten Bandung Barat periode 2020. Penelitian ini dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada Kepala SKPD dan Kepala Sub Bagian Keuangan pada SKPD Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

1. Berdasarkan analisis deskriptif dapat disimpulkan bahwa: (a) Kompetensi SDM (X1) pada Kantor SKPD Kabupaten Bandung Barat termasuk dalam kategori baik yakni dengan rata rata skor sebesar 76,4%. (b) Sistem Pengendalian Internal (X2) pada Kantor SKPD Kabupaten Bandung Barat termasuk dalam kategori baik dengan rata rata skor sebesar 81,2%. (c) Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual (X3) pada Kantor SKPD Kabupaten Bandung Barat termasuk dalam kategori baik dengan rata rata skor sebesar 75,6%. (d) Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y) pada SKPD Kabupaten Bandung Barat memiliki kategori Baik sebesar 79,5%.
2. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara simultan diketahui bahwa Kompetensi SDM, Sistem Pengendalian Internal, dan Standar Akuntansi berbasis Akrual memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada bagian keuangan Satuan Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat.
3. Berdasarkan pengujian hipotesis secara parsial, didapat bahwa: (a) Kompetensi SDM (X1) berpengaruh signifikan dengan arah yang positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) pada SKPD Kabupaten Bandung Barat. (b) Sistem Pengendalian Internal (X2) tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) pada SKPD Kabupaten Bandung Barat. (c) Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual (X3) tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) pada SKPD Kabupaten Bandung Barat.

#### Referensi

- [1] Armel, R. Y. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *JOM Fekon*, 105-119.
- [2] Inapty, A. B., & Martiningsih, S. P. (2016). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan. *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 27-42.
- [3] Kiranayanti, I. A., & Erawati, N. M. (2016). Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Basis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 1290-1318.
- [4] Latifah, A. (2017). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Informaasi Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada SKPD Kabupaten Bantul). *Skripsi*.
- [5] Nadir, R., & Hasyim. (2017). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (Studi Empiris di PEMDA Kabupaten Barru). *AKUNTABEL*
- [6] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal
- [7] *Pikiran Rakyat*. (2019, Oktober 20). Diambil kembali dari Ribuan Aset Belum Bersertifikat, Pemkab Bandung Barat Sulit Beroleh WTP: <https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2019/03/21/ribuan-aset-belum-bersertifikat-pemkab-bandung-barat-sulit-beroleh-wtp>
- [8] Riniwati, H. (2016). *Manajemen Sumberdaya Manusia: Aktivitas Utama dan Pengembangan SDM*. Malang: Tim UB Press.